

# PEMBINAAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM MENINGKATKAN INTEGRASI BANGSA

**Eli Karliani**

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Palangka Raya  
Jl. Yos Sudarso Tanjung Nyahoo Palangka Raya

**Abstrak:** The elucidation of multicultural society in Palangka Raya is needed to increase the integration of the nation because the society of Palangka Raya is variety in ethnic, religion, language, culture, and individual characteristic. By using the observation, interview, documentation and literature study, it revealed the deeper problem where can be found the actual data. To government is by the understanding of ethnic values and the cultural relativism, through Communication Forum of Cross-Ethnic (FKLE) and Communication Forum of Religions (FKUB), old customs in orderliness of Palangka Raya city's law No. 18 in 2007 about Kedamangan. In the ethnic groups, by having the cultural collaboration as the form of cultural assimilation, the exchange of the village headman with the customs figure from each ethnic, and by adaption process through the motto when in rome do as the romans do. In school the subject of cross cultural understanding and multicultural values has been inserted in the religion subject, civic education, and Indonesian language. In family, by inserted the religious values and humanity will eliminate the stereotyped and the fanaticism ethnic or religion.

**Abstrak:** Pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya diperlukan dalam meningkatkan integrasi bangsa karena masyarakat Kota Palangka Raya adalah masyarakat yang beragam secara etnik, agama, bahasa, budaya, maupun karakter individunya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Pembinaan masyarakat multikultural dalam meningkatkan integrasi bangsa di Kota Palangka Raya dilakukan oleh pemerintah, paguyuban etnik, sekolah, maupun keluarga. Cara mengatasi hambatan pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa melalui pemerintah yaitu dengan adanya pemahaman mengenai nilai etika dan relativisme budaya, melalui Forum Komunikasi Lintas Etnik (FKLE) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), lembaga adat dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Kedamangan. Di Paguyuban etnik dengan adanya kolaborasi budaya sebagai bentuk asimilasi budaya, pertukaran demang adat dengan tokoh adat dari masing-masing etnik, serta melalui proses adaptasi budaya melalui moto dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Di sekolah kurikulum yang secara khusus memberikan pendidikan multikultural belum ditemukan tetapi mata kuliah *cross cultural understanding* dan nilai-nilai multikultural yang disisipkan pada mata pelajaran agama, PKn, dan bahasa Indonesia. Di Keluarga dengan menanamkan nilai-nilai agama masing-masing dan nilai-nilai kemanusiaan akan menghapus sikap stereotif dan fanatisme etnik maupun agama.

**Kata Kunci:** Pembinaan, masyarakat multikultural, integrasi bangsa

Kymlicka, (2003:263) menyebutkan bahwa hak-hak yang membedakan kelompok akan mengurangi rasa jati diri warga negara yang sama yang mengikat masyarakat, hak-hak itu akan menjadi sumber perpecahan yang dapat mengarah pada bubarnya negara atau pada berkurangnya keinginan untuk saling berkorban dan menyesuaikan diri yang diperlukan untuk

berjalannya demokrasi. Pendapat Kymlicka sangat relevan dengan kondisi bangsa Negara Indonesia yang majemuk yang disatu sisi dapat memperkaya khasanah budaya bangsa tetapi disisi lain rawan terhadap konflik horizontal yang mengancam disintegrasi bangsa.

Fakta bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk yang didalamnya tumbuh keberagaman

etnik, budaya, agama, dan ras, adalah kenyataan yang harus diterima oleh kita sebagai suatu perbedaan yang sifatnya alamiah (*natural sunatullah*) Abdullah, dalam (Yakin, 2005:xix). Perbedaan itu seharusnya diakui sebagai suatu kekayaan yang menjadi potensi bagi berkembangnya pola kehidupan yang adil dan beradab, bukan untuk menimbulkan sikap diskriminatif yang diawali oleh sikap hidup yang mencerminkan iri hati, dengki, dan juga buruk sangka, sehingga menimbulkan konflik dari adanya perbedaan itu, Yakin, (2005:190).

Kymlicka, (2003:263) menyebutkan bahwa hak-hak yang membedakan kelompok akan mengurangi rasa jati diri warga negara yang sama yang mengikat masyarakat, hak-hak itu akan menjadi sumber perpecahan yang dapat mengarah pada bubarnya negara atau pada berkurangnya keinginan untuk saling berkorban dan menyesuaikan diri yang diperlukan untuk berjalannya demokrasi. Pendapat Kymlicka sangat relevan dengan kondisi bangsa Negara Indonesia yang sangat majemuk yang disatu sisi dapat memperkaya khasanah budaya bangsa tetapi disisi lain rawan terhadap konflik horizontal yang mengancam disintegrasi bangsa.

Parekh (2001) dalam Supardan (2004:8), multikulturalisme mengandung tiga komponen yakni : *pertama*, terkait dengan kebudayaan, *kedua*, merujuk pada pluralitas kebudayaan, *ketiga*, cara tertentu untuk merespon pluralitas itu. Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia untuk bisa saling menghargai keanekaragaman budaya yang harus diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan sosial mereka.

Terminologi multikulturalisme menurut Stavenhagen (dalam Supardan, 2004:48) mengandung dua pengertian, yaitu: (1) merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang heterogen, dan (2) multikulturalisme berarti keyakinan, ideologi, sikap, atau kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budayanya sebagai sesuatu yang berharga, potensial, yang harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Sejalan dengan terminologi di atas, (Supardan, 2004:8) mengemukakan bahwa kata kunci dalam multikulturalisme ini adalah “perbedaan” dan “penghargaan”, dua kata yang selama ini sering dikonfrontasikan.

Integrasi mungkin menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah, dan pada

pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan adanya nilai yang minimum yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Ada dua strategi kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai integrasi nasional adalah: (1) penghapusan sifat-sifat kulturil utama dari komuniti-komuniti minoritas yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional, (2) penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan-kebudayaan kecil yaitu melalui kebijaksanaan “Bhinneka Tunggal Ika” (Weiner, dalam Muhaimin, 1985:34).

Wriggins, dalam Muhaimin, (1985 : 59), mengungkapkan bahwa dalam masyarakat mozaik yang terdiri dari bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya dimana setiap bagian dibatasi dengan ketat dan terpisah satu sama lainnya. Di beberapa negara orang-orang lebih banyak dipisahkan daripada dipersatukan. Hal ini disebabkan oleh : 1) Perbedaan bahasa, rasa berteman sulit untuk dikembangkan apabila perbedaan bahasa memisahkan yang satu dengan yang lainnya, 2). Perbedaan kedaerahan (*status group*), orang-orang akan merasa sebagai bagian dari daerah, suku, atau kastanya sebelum mereka menyatakan kesetiaan kepada bangsanya yang lebih luas.

Secara umum tujuan penulisan artikel ini adalah menemukan informasi dan mengkaji tentang pembinaan masyarakat multikultural dalam meningkatkan integrasi bangsa ditinjau dari hubungan antaretnik di Kota Palangka Raya. Selain tujuan di atas penulisan juga bertujuan untuk mengkaji: (1) pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa, (2) mengkaji bentuk pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa, dan (3) solusi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya.

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang menekankan pada fenomena yang aktual dalam kehidupan nyata, yang diungkap secara mendalam berdasarkan pada pertanyaan mengapa dan bagaimana. Lebih jelasnya mengenai studi kasus K.Yin (2008:1), mengemukakan bahwa : Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan

dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konstek kehidupan nyata. Adapun teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur dengan peneliti sebagai instrumen utamanya (*key instrumen*).

## HASIL

### Pembinaan Masyarakat Multikultural di Kota Palangka Raya diperlukan dalam Meningkatkan Integrasi Bangsa

Pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya diperlukan dalam meningkatkan integrasi bangsa karena masyarakat Kota Palangka Raya mempunyai keberagaman tidak hanya dari etniksnya tetapi agama, bahasa, karakter, mata pencaharian, dll. Adapun keberagaman tadi, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa tokoh etnik dapat dinyatakan pada tabel 1.

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa masyarakat Kota Palangka Raya adalah masyarakat yang multikultural. Masyarakatnya mempunyai keragaman dari segi karakter, pekerjaan, bahasa, maupun agamanya. Keberagaman tersebut tidak hanya dimiliki oleh individu yang berbeda etnik tetapi menunjukkan

**Tabel 1.** Nama etnik, Karakter umum, Pekerjaan, Bahasa, Agama di Kota Palangka Raya

Nama Etnik	Karakter umum yang dimiliki	Pekerjaan yang diminati	Bahasa	Agama
<i>Dayak Ot Danum</i>	Terbuka, sopan santun, berani, sedikit berbicara, kurang percaya diri, kurang ulet	Sebagian besar atau sekitar (90%) PNS	Dayak Ot Danum	Islam, Kristen Hindu, Kaharingan
<i>Banjar</i>	Agamis, ulet, terbuka, keras	Lebih dari (50%) pedagang, buruh, PNS	Banjar	Islam
<i>Jawa</i>	Ulet, kerja keras, ramah, tegas	Pedagang, PNS, buruh.	Jawa	Islam mayoritas, dan Kristen
<i>Bali</i>	Tegas, ulet, suka damai	Mayoritas PNS kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan	Bali	Mayoritas Hindu, Islam, Kristen
<i>Maluku</i>	Mudah beradaptasi, ulet	PNS di kepolisian, swasta, dll.	Ambon/Bahasa Indonesia	Kristen, Islam
<i>Papua</i>	Keluargaannya kuat, keras	Brimob, TNI	Papua, Dayak	Mayoritas Kristen
<i>Batak</i>	Tegas, ulet, emosional	Jaksa, Hakim, Pengacara, swasta	Batak	Kristen Islam

**Tabel 2.** Penyebab Konflik Etnik Dayak Madura Tahun 2001 di Kota Palangka Raya

NO	FAKTOR	PENYEBAB KONFLIK
1	<b>Ekonomi</b>	Secara ekonomi etnik Dayak terlalu dimanjakan oleh alam, dan pilih-pilih pekerjaan, sedangkan Madura ulet dalam semua pekerjaan.
2	<b>Politik</b>	Kegagalan tokoh Madura untuk membina warganya agar dapat beradaptasi dengan budaya setempat, adanya keinginan etnik Madura untuk mendominasi wilayah Sampit sebagai Sampang kedua menyebabkan seluruh warga Dayak bersatu untuk memperjuangkan itu, dan konflik merembet ke Palangka Raya dan kabupaten lainnya dengan tujuan untuk mengusir etnik Madura dari tanah Dayak Kalimantan Tengah.
3	<b>Hukum</b>	Tidak adanya proses hukum dalam menyelesaikan setiap perkara hukum yang mencerminkan tidak adanya keadilan dalam penyelesaian hukum.
4	<b>Sosial Budaya</b>	Karakter Madura yang keras dan suka memaksakan kehendak bertolak belakang dengan karakter etnik Dayak yang lebih menghindari konflik.

pula keberagaman yang ada pada individu masing-masing etnik. Dengan keberagaman tersebut disatu sisi dapat membawa manfaat positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya bangsa tetapi sisi lain keberagaman tersebut dapat mendorong terjadinya konflik.

Mengenai konflik, tabel berikut ini menggambarkan faktor penyebab konflik etnik yang merupakan akumulasi dari gesekan-gesekan konflik individu antara Dayak dan Madura tahun 2001 di Kota Palangka Raya :

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa konflik etnik yang terjadi di Kota Palangka Raya adalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya karakter orang Madura yang keras, dan suka membawa celurit ke tempat umum, suka merampas, suka memaksakan kehendak, suka mencuri, membuat tarif semaunya, sikap-sikap orang Madura seperti disebutkan di atas membuat etnik Dayak kurang simpati terhadap etnik Madura, etnik Dayak yang selalu menghindar tetapi akhirnya mereka semakin berani ketika kekurangan simpatiannya didukung juga oleh faktor-faktor lainnya hingga akhirnya memuncak pada konflik 2001.

### Bentuk Pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa

Bentuk pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa dapat terlihat dari tabel 3.

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pembinaan masyarakat multikultural dalam meningkatkan integrasi bangsa menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, paguyuban etnik, sekolah, dan keluarga. Pemerintah memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi semua warganya untuk berpartisipasi dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Paguyuban etnik membina warganya dalam bidang keagamaan, budaya dan seni, serta sosial untuk bisa beradaptasi dengan etnik lain. Sekolah melalui mata pelajaran agama, PKn, bahasa Indonesia, memberikan wawasan multikultural kepada peserta didik untuk senantiasa mencintai bangsa dan negaranya yang beragam. Keluarga melalui penanaman nilai-nilai agama, kemanusiaan, bahasa, dan budaya untuk mempunyai sikap toleran terhadap keberagaman.

**Tabel 3.** Bentuk Pembinaan Masyarakat Multikultural dalam meningkatkan integrasi bangsa di Kota Palangka Raya

Pemerintah	Lembaga Sosial (paguyuban etnik)	Lembaga Pendidikan (Sekolah)	Keluarga
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moral</li> <li>▪ Politik</li> <li>▪ Hukum</li> <li>▪ Ekonomi</li> <li>▪ Sosial Budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keagamaan</li> <li>▪ Budaya dan Kesenian</li> <li>▪ Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agama</li> <li>▪ PKn</li> <li>▪ Bahasa Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemahaman nilai-nilai agama, kemanusiaan dalam hubungan dengan anggota keluarga, teman, atau tetangga.</li> <li>▪ Bahasa</li> <li>▪ Budaya</li> </ul>

**Tabel 4.** Hambatan dan Solusi dalam mengatasi hambatan pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa

	Pemerintah	Lembaga Sosial (Paguyuban Etnik)	Lembaga Pendidikan (Sekolah)	Keluarga
<b>Hambatan</b>	Steorotife, ethnosentrisme	Fanatisme agama, ethnosentrisme	Kurikulum	Steorotife, fanatisme etnik dan agama
<b>Solusi</b>	Nilai etika dan fluralisme budaya, FKLE, FKUB, lembaga adat kedadangan	Pertukaran demang adat, kolaborasi budaya, adaptasi budaya	PKn Agama Bahasa Indonesia Cross cultural understanding,	Nilai agama, dan kemanusiaan

### Solusi untuk mengatasi hambatan pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa

Solusi untuk mengatasi hambatan pembinaan masyarakat multikultural dalam meningkatkan integrasi bangsa adalah terlihat pada tabel 4.

Dari tabel 4 dapat terlihat bahwa dalam pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa melalui pemerintah, lembaga sosial (paguyuban etnik), lembaga pendidikan (sekolah), maupun keluarga, pasti menemui berbagai hambatan, dan hambatan tersebut selama ini dapat diatasi oleh beberapa langkah dan program pemerintah.

## PEMBAHASAN

### Pembinaan Masyarakat Multikultural di Kota Palangka Raya diperlukan dalam Meningkatkan Integrasi Bangsa

Pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya diperlukan untuk meningkatkan integrasi bangsa terlihat pada tabel 5.

Dari tabel 5 terlihat bahwa masyarakat Kota Palangka Raya sudah dapat disebut sebagai masyarakat multikultural karena dari berbagai keberagaman yang ada seperti etnik, agama,

bahasa, budaya, karakter, semuanya sudah menunjukkan adanya sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi sehingga tercipta masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman.

Pada dasarnya masyarakat Dayak sangat menghormati pendatang yang masuk karena mereka dari dahulu mempunyai filosofi rumah betang adalah rumah yang panjang mereka bisa hidup dalam satu rumah dengan berbagai keluarganya yang berbeda keyakinan, bahasa dan berbeda etnik. Mengenai nilai-nilai dalam filosofi rumah betang diperkuat adalah *Handep haruyong* (gotong royong) dalam acara *manugal* (menanam bibit padi) dan *harubuh* (menuai/ panen), *hadohop* (tolong menolong) seperti tergambar dalam *handep* (arisan kerja), *gawi hantantiring* (melakukan pekerjaan saling memberi dorongan/motivasi), *belomhong kapakat* (hidup rukun), *tutu atei* (tulus dalam melakukan pekerjaan/membantu sesama).

Hal ini sesuai pendapat Stavenhagen (1986) dalam Supardan (2004:48) memandang bahwa konsep “multikulturalisme” mengandung dua pengertian. Konsep pertama; ia merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang heterogen. Pernyataan dari segi ini sebanyak 95 % negara-negara di dunia pada dasarnya adalah bersifat multikultural mengingat secara etnik dan budaya bersifat plural. Konsep kedua; multikulturalisme

**Tabel 5.** Alasan perlunya pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa

ALASAN	TUJUAN	HASIL PENELITIAN
<i>Keberagaman secara etnik</i>	Berbaur dan ada interaksi yang bermakna	Konflik etnik Dayak Madura tahu 2001 disebabkan adanya hubungan antaretnik yang kurang bermakna khususnya etnik Dayak dan Madura, tetapi sudah ada resolusi konflik dengan banyak warga Madura yang datang kembali ke Kota Palangka Raya
<i>Keberagaman agama</i>	Sikap saling menghargai dan toleransi	Sikap toleransi yang tinggi tinggi terhadap keberagaman agama dari budaya saling mengunjungi pada hari besar keagamaan, mesjid dan gereja yang letaknya berdekatan,dll
<i>Keberagaman bahasa</i>	Berusaha ingin mengetahui bahasa etnik lain	Perkawinan antaretnik yang banyak dilakukan, lingkungan keluarga, pergaulan, pekerjaan yang terdiri dari beragam bahasa menyebabkan lebih cepat mempelajari bahasa etnik lain
<i>Keberagaman budaya</i>	Menghargai dan ingin tahu budaya orang lain	Asimilasi budaya atau akulturasi sudah dikolaborasikan oleh beberapa etnik dalam bentuk seni dan budaya.
<i>Keberagaman karakter</i>	Sikap saling memahami, menghormati, tidak saling curiga	Sikap dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung sudah diterapkan oleh etnik pendatang, dan falsafah ‘budaya rumah betang’ dari etnik pribumi.

telah diangkat sebagai suatu keyakinan, ideologi, sikap, maupun kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budayanya sebagai sesuatu yang berharga, potensial, yang harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan.

Kota Palangka Raya adalah mininya NKRI, mini di sini artinya bisa dilihat asal pejabat kepala dinas yang berasal dari berbagai daerah, misalnya Aceh dan Batak. Masyarakat Dayak sangat terbuka, menerima berbagai suku, agama, keluarga. Sikap demikian memberikan peluang kepada pendatang untuk menjadi gubernur, camat, kepala dinas, dsb. Mininya NKRI bisa untuk menjadi prototipe Kalteng dalam kehidupan multikultural. Hal ini sesuai dengan pendapat Kymlicka (2002:ix) yang menyatakan bahwa masyarakat multikultural adalah sebuah masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai atau sebuah negeri dengan banyak bangsa.

Dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang semakin beragam kehidupan dan orientasinya maka diperlukan satu teori kewarganegaraan yang dapat menjembatani keberagaman tersebut membentuk sebuah integrasi bangsa. Demikian pula di Kota Palangka Raya dimana masyarakatnya yang sangat beragam tadi sulit sekali untuk mencapai konsensus dalam mencapai integrasi bangsa apalagi setelah konflik etnik Dayak Madura tahun 2001. Konflik etnik tersebut memberikan pelajaran bagaimana hubungan masyarakat bangsa dan negara dapat terjalin harmonis dalam sebuah moto *Bhinneka Tunggal Ika*.

Sesuai dengan teori kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Gustain (1998:20) yang terdiri dari teori *liberal-individualistic*, *komunitarian*, *republikan*, dan *neorepublikan* sebagai teori kewarganegaraan alternatif, maka teori *neorepublikan* gabungan dari ketiga teori sebelumnya, yaitu penyelenggaraan negara, terutama praktek kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas lebih mengutamakan pelayanan publik secara lebih damai. Misalnya mencari kebenaran dengan cara berdebat, menggunakan akal sehat, mengembangkan sikap toleransi dalam masyarakat pluralis, dan membatasi secara berhati-hati dalam menggunakan kekerasan. Neorepublikan pun mengutamakan kebajikan (*civicvirtues* dan *public good*) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, bukan sekedar mematuhi aturan hukum semata. Tindakan

pimpinan didasarkan pada kewenangan yang wajar, kemampuan, dan tanggung jawab sesuai dengan situasi dan kedudukannya. Namun demikian, kemampuan individu sangat penting pula dalam praktik kewarganegaraan. Gunsteren (1988:24) menegaskan "*A chairman who does not break the rules but is otherwise incompetent in presiding over and guiding a meeting can be a disaster*" (Seorang pimpinan rapat yang tidak melanggar tata tertib tetapi tidak mampu memimpin sidang dapat menjadi bencana). Pengutamaan kompetensi tidak harus berlebihan. Kebajikan bukan hanya berdasarkan kompetensi melainkan juga memperhatikan etika kesopanan atau perilaku sopan santun. Neorepublikan mengakui etika otonom dari domain publik yang bukan diperoleh dari etika atau pendapat pribadi melainkan yang berakar dalam domain publik sendiri. Dalam konteks kehidupan bernegara, peran individu yang berfungsi sebagai warga negara memiliki peran yang sentral dalam domain publik namun peran etika dan pendapat pribadi tersebut tidak pernah melampaui sebagai mediasi. Menurut Gunsteren, (1998) "*Citizen's contributions are more than the mere sum of the opinions and desires they have as private individuals*". (Sumbangan warga negara hanya sekedar pendapat dan harapan yang mereka miliki sebagai pribadi individu). Kewarganegaraan dikonsepsikan sebagai suatu jabatan dalam komunitas publik. Ini berarti bahwa warga negara tidak diperlakukan sebagai orang biasa atau pribadi semata. Ini berarti juga bahwa ada kondisi pengakuan umum praktik dalam kehidupan kewarganegaraan. Republik seyogyanya tidak hanya memfasilitasi akses dalam kehidupan kewarganegaraan melainkan juga memformulasikan dan memelihara kondisi tersebut. Teori kewarganegaraan republik tidak hanya menunggu individu untuk kerja dengan sendirinya secara spontan sebagai warga negara tetapi harus mendorong pengembangan orang menjadi warga negara yang mandiri dan kompeten. "*Individuals are not naturally given; they are socially formed*." (Gunsteren, 1998:25). Apabila hal ini tidak terjadi, dalam arti orang tidak mendapat kesempatan menjadi warga negara yang dibentuk oleh komunitas masyarakat setempat, maka pemerintahlah yang turun tangan.

Dalam masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya ruang gerak dari keberagaman secara etnik, agama, bahasa, karakter, maupun budaya tadi harus dapat menciptakan kesatuan meskipun dalam praktek hubungan sosial

terkadang kita tidak dapat membatasi ruang gerak kita antara domain publik (hukum, politik, ekonomi) dan domain privatnya (agama/keyakinan). Tetapi pada dasarnya hak-hak publik masyarakat Kota Palangka Raya sudah diberikan sepenuhnya oleh pemerintah Kota Palangka Raya kepada semua warganya terlihat dari beberapa ruang publik yang memberikan kesempatan terbuka bagi seluruh warganya meskipun mereka adalah etnik pendatang. Dengan demikian dorongan atau transformasi budaya bagi semua masyarakat Kota Palangka Raya akan terlihat dimana seluruh masyarakat diharapkan menjadi warganegara yang mandiri dan kompeten. Orang Dayak yang asalnya terlalu dimanjakan oleh alam dan kurang terlibat dalam domain publik, sekarang sudah tidak lagi. Etnik pendatang mempunyai tanggung jawab juga untuk dapat turut serta dalam pembangunan Kota Palangka Raya dan untuk memajukan Kota Palangka Raya.

Pada domain publik masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya mempunyai hak untuk dapat mengekspresikan kebudayaannya dalam hubungan antar etnik melalui hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Interaksi sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh setiap orang ketika dia bertindak dalam sebuah relasi dengan orang lain. Interaksi sosial merupakan proses yang kompleks, yang dilalui oleh setiap orang ketika mengorganisasi dan menginterpretasikan persepsi dia tentang orang lain dalam situasi di mana kita sama-sama berada, sehingga memberi kita kesan mengenai siapakah orang lain itu, apa yang dia sedang perbuat, dan apa sebab dia berbuat seperti itu.

Sejalan dengan hal di atas Sosiolog Knapp (dalam Supardan, 2004:63) dalam bukunya "*Social Intercourse: From Greeting to Goodbye*" menjelaskan tahapan-tahapan interaksi antar etnik secara rinci dari tahapan memulai (*initiating*), menjajaki (*experimenting*), meningkatkan (*intensifying*), menyatupadukan (*integrating*), dan terakhir mempertalikan (*bonding*). Semua dari tahapan itu akan berkontribusi menuju pengembangan integrasi bangsa yang menjadi bagian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dalam berintegrasi satu sama lainnya jelas merupakan suatu naluri sebagai mahluk sosial. Duverger (1985: 354) seorang ahli sosiologi-politik Prancis dalam bukunya *The Study of Politics*, berkaitan dengan pentingnya interaksi sesama manusia, lebih jauh menyatakan bahwa "interaksi"

pada hakekatnya merupakan suatu naluri yang paling dalam yang mendorong para anggotanya untuk hidup bersama.

Kondisi ekonomi, politik, sosial, memberikan arti penting untuk menciptakan suasana kondusif bagi persatuan bangsa. Kota Palangka Raya di atas yang multietnik, agama, maupun bahasa, maka integrasi bangsa akan diwujudkan apabila dari masing-masing bangsa yang beragam secara etnik, agama, maupun bahasa, mempunyai sikap integratif untuk bisa mencapai tujuan bersama dengan adanya sikap mau bekerjasama diantara orang yang beragam tadi dalam semua lingkup kehidupan baik politik, hukum, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Sifat-sifat kultural yang dimiliki oleh masing-masing etnik harus dihilangkan dalam domain publik agar pencapaian tujuan bersama tadi dapat lebih cepat untuk dicapai tanpa ada hambatan yang berarti. Melalui moto "Bhinneka Tunggal Ika" yang sudah dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan keberagaman tadi diharapkan lebih direvitalisasi untuk menjawab tantangan multikultural di Kota Palangka Raya.

### **Bentuk Pembinaan Masyarakat Multikultural Di Kota Palangka Raya Dalam Meningkatkan Integrasi Bangsa**

Bentuk pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa khususnya dalam hubungan antaretnik terlihat pada tabel 6.

Dari tabel 6 dapat terlihat bahwa bentuk pembinaan masyarakat multikultural dalam meningkatkan integrasi bangsa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya meliputi pemenuhan hak-hak publik baik itu dalam bidang politik, hukum, ekonomi, budaya kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Palangka Raya dengan tidak memandang keberagaman etnik, agama, bahasa, serta budaya. Selain itu juga pembinaan dalam bentuk moral bertujuan untuk dijadikan pedoman oleh seluruh masyarakat Kota Palangka Raya dalam pemenuhan hak-hak publiknya seluruh masyarakat harus menjunjung tinggi budaya masyarakat setempat khususnya filosofi rumah betang yang menjadi pedoman hidup berdampingan dalam keberagaman.

Sesuai dengan pendapat Rex dalam (Liliweri, 2005:59) bahwa masyarakat multikultur yang ideal adalah konsonan dari keseimbangan peluang,

**Tabel 6.** Bidang/Materi Binaan, Warga Binaan, Proses dalam Pembinaan Masyarakat Multi kultural di Kota Palangka Raya melalui pemerintah

Bidang/ Materi Binaan	Pembina	Media	Proses Pembinaan
<i>Moral</i>	Walikota Palangka Raya	Borneo TV, TVRI Kalteng, Kalteng Post, Palangka Post, Dayak Post, dll	Melalui pidato pemerintahan diakhir pidato ada kalimat “dengan filosofi rumah betang dan budaya isen mulang pantang mundur mari kita jaga, kita tata kota cantik ini bersama-sama
<i>Politik</i>	Pemkot Palangka Raya	-	Caleg&pejabat Kota Palangka Raya berasal dari etnik manapun
<i>Hukum</i>	Aparat Hukum	-	Ketegasan aparat hukum, kepolisian, Jaksa, Hakim, dalam menyelesaikan kasus hukum.
<i>Ekonomi</i>	Koperasi, UKM	-	Koperasi untuk seluruh lapisan masyarakat, peluang usaha yang terbuka bagi etnik manapun
<i>Budaya</i>	Dinas Budpar	-	Pembinaan sanggar seni tiap paguyuban etnik, festival budaya kota.

sebuah prinsip dasar demokrasi ketika suatu masyarakat dipersatukan dalam masalah atau isu privat dan isu domain (hukum, politik, dan ekonomi), tetapi disaat yang sama merangkul perbedaan dan keberagaman masalah privat dan komunal (kehidupan domestik, agama, dan moralitas).

Dalam pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya masing-masing etnik mempunyai bentuk pembinaan yang berbeda, hal ini sesuai dengan kebudayaan yang mereka miliki. Pembinaan yang diterima oleh masyarakat Kota Palangka Raya pada umumnya yaitu melalui kesenian. Adapun kegiatan yang sifatnya hubungan sosial itu melalui arisan, arisan itu untuk mengikat atau sekedar menjadi tempat kumpul-kumpul tiap anggota paguyuban. Kalau ada perkumpulan semacam itu mereka akan merasa betah tinggal di negeri orang sehingga akan tercipta integrasi bangsa. Selain itu bentuk pembinaan masyarakat multikultural yang ada di paguyuban kulowargo wong jowo adalah kolaborasi kebudayaan melalui campur sari yang ditayangkan di TVRI Kalteng dimana dalam acara tersebut budaya Jawa dan Dayak berusaha dikolaborasikan dengan mengangkat berbagai persoalan sosial yang ada di Kota Palangka Raya. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh etnik Maluku bersifat sosial dan agama. Bersifat sosial misalnya dalam perayaan hari raya kurban warga Maluku mengumpulkan uang untuk dibelikan kambing dan

disumbangkan kepada panti asuhan yang ada di Kota Palangka Raya. Etnik Bali melakukan pembinaan dalam paguyubannya melalui kegiatan-kegiatan ritual agama sesuai dengan falsafah orang Bali yaitu “*nyamoo braye*”, *nyamoo* itu saudara, *braye* itu tetangga. Jadi bisa diartikan bersaudara dengan tetangga dan di Bali itu disebutnya kalau di *Negare* istilahnya mau kemana kamu sekarang, “*ni nyamoo slam ada acara*” Jadi saling mendukung diantara warga Bali yang berbeda agama dilakukan dalam bentuk saling mengunjungi ketika ada perayaan hari besar agama.

Sejalan dengan itu pendapat Robert Park seorang teoretisi sosiolog dalam Liliweri (2005:157), mengemukakan bahwa migrasi keluar orang-orang Eropa dapat dipandang sebagai katalisator bagi reorganisasi masyarakat di seluruh dunia. Menurut dia, reorganisasi itu terjadi karena kontak yang teratur melalui beberapa tahap antara imigran dan penduduk setempat, yang disebut *race relations cycle*. Menurut Park, lingkaran relasi antara etnik mengikuti tahap-tahap kontak, persaingan, akomodasi, dan lebih kerap asimilasi. Misalnya, pada tahap pertama, diadakan kontak awal antartetnik. Kaum imigran bersama penduduk setempat menyelidiki kemungkinan kerja sama apa yang akan dibentuk, apakah kerja sama itu diwadahi dalam organisasi sosial yang sudah ada, atau perlu dibentuk organisasi sosial baru untuk mewadahi kerja sama itu. Pada tahap kedua,



**Tabel 7.** Bidang/Materi Binaan&Proses dalam Pembinaan Masyarakat Multikultural di Kota Palangka Raya melalui Lembaga Sosial (Paguyuban Etnik)

Bidang/Materi Binaan	Proses Pembinaan
<b>Keagamaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arisan bersama</li> <li>▪ Kebaktian, Natal bersama</li> <li>▪ Pengajian bersama</li> <li>▪ Saling mengunjungi ketika hari raya keagamaan</li> </ul>
<b>Budaya&amp; Kesenian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempelajari bahasa tiap etnik melalui perkawinan</li> <li>▪ Kolaborasi budaya : Vocal grup (Maluku, Dayak, Ambon, Manado, NTT), adat perkawinan Dayak Papua, campur sari Dayak, Jawa, Banjar</li> <li>▪ Pernikahan beda etnik/agama</li> </ul>
<b>Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saling membantu ketika ada orang yang meninggal</li> <li>▪ Saling membantu ketika ada orang yang sakit</li> <li>▪ Saling membantu ketika ada orang yang mengalami kesulitan</li> <li>▪ Saling membantu ketika hari Raya agama</li> </ul>
<b>Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nasehat generasi tua kepada generasi muda apabila ada yang terlibat konflik dengan etnik lain</li> </ul>

hubungan antaretnik memasuki tahap persaingan, di mana etnik pendatang maupun penduduk lokal dibiarkan dan membiarkan diri saling bersaing secara adil untuk memperoleh barang-barang kebutuhan, pekerjaan untuk mencukupi hidup, maupun perolehan sumber daya lainnya. Tahap terakhir adalah akomodasi, di mana imigran dan kaum petualang digerakan untuk mengubah dan mengadaptasikan diri dengan lingkungan baru. Menurut Park, kebanyakan kaum imigran memilih langsung melakukan asimilasi dengan penduduk setempat, karena menganggap bahwa berasimilasi dapat melanggengkan relasi daripada akomodasi yang menghasilkan kebersamaan yang tidak stabil. Tujuh dimensi adaptasi budaya dalam proses asimilasi: asimilasi budaya, struktural, perkawinan, identifikasi, sikap resepsional, perilaku resepsional, dan asimilasi kewarganegaraan. Dalam karya terakhirnya, *Human Nature, Class dan Ethnicity* (1978), Gordon mengakui bahwa teori asimilasi yang dia bangun kurang memperhatikan isu pengaruh kekuasaan terhadap kaum imigran, terutama yang melibatkan hubungan konflik antara orang kulit putih dan hitam, khususnya berkaitan dengan kekuasaan ekonomi, ketidakseimbangan dalam sumber daya material.

Pendidikan multikultural di sekolah di Kota Palangka Raya memang belum terpisah menjadi satu mata pelajaran khusus di sekolah tetapi muatan nilainya dapat disisipkan ke dalam mata pelajaran lainnya. Kebutuhan dan urgensi

pendidikan multikultural demokratis setidaknya setelah terjadinya konflik antar etnik tahun 2001 di Kota Palangka Raya dirasakan semakin mendesak bagi masyarakat kota Palangka Raya yang multikultural. Di Palangka Raya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya, masyarakat Kota Palangka Raya semakin “multikultural” karena proses migrasi penduduk luar ke kota Palangka Raya tersebut begitu pesat. Mereka datang melalui program transmigrasi maupun perorangan yang tertarik oleh peluang-peluang usaha di Kota Palangka Raya yang sedang gencar membangun dan berbenah diri. pendidikan multikultural dikembangkan berhadapan dengan meningkatnya “multikulturalisme” di kota Palangka Raya tersebut, maka paradigma, konsep dan praktek pendidikan “multikultural” semakin relevan untuk diterapkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hefner (2001:9-10). Terdapat persepsi dalam masyarakat untuk secara *taken for granted* menerima bahwa *civil society* selalu mendorong keadaban dan demokrasi. Padahal, terdapat kecenderungan, bahwa *civil society* terorganisasi berdasarkan distingsi sosial, budaya, etnik, dan agama, sehingga cenderung eksklusif dan merasa paling benar sendiri sehingga dapat kontra-produktif tidak hanya terhadap multi-kulturalisme, tetapi juga bahkan terhadap demokrasi. Karena itu, dalam hal *civil*

**Tabel 8.** Bidang/Materi Binaan&Proses dalam Pembinaan Masyarakat Multikultural di Kota Palangka Raya melalui Lembaga Pendidikan (Sekolah)

Bidang/Materi Binaan	Proses Pembinaan
<i>Agama</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agama mengajarkan perilaku yang baik</li> <li>▪ Lebih banyak aplikasi (Saling mengunjungi ketika hari raya keagamaan)</li> <li>▪ Tidak terlalu eksklusif</li> </ul>
<i>PKn</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanaman nilai-nilai etika</li> <li>▪ Penanaman sikap nasionalisme</li> </ul>
<i>Bahasa Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia</li> </ul>
<i>Cross Cultural Understanding</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sikap toleransi terhadap keberagaman</li> </ul>

**Tabel 9.** Bidang/Materi Binaan &Proses dalam Pembinaan Masyarakat Multikultural di Kota Palangka Raya melalui Keluarga

Bidang/Materi Binaan	Proses Pembinaan
Nilai Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua Agama mengajarkan perilaku yang baik</li> <li>▪ Perbedaan adalah bersifat natural sunatullah</li> <li>▪ Tidak terlalu fanatik dalam menjalankan nilai agama di domain publik</li> <li>▪ Penanaman nilai-nilai etika</li> </ul>
Nilai Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saling tolong menolong dengan sesama anggota keluarga&amp;tetangga</li> <li>▪ Tidak ada larangan untuk membatasi pergaulan dengan teman yang berbeda agama, etnik</li> <li>▪ Mempelajari bahasa dan budaya etnik lain</li> <li>▪ Mencintai dan menyayangi sesama manusia</li> </ul>

*society* seperti ini, perlu pengembangan sikap inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralitas. Pada saat yang sama, juga terdapat sangat banyak *civil society* yang mengatasi berbagai garis demarkasi tersebut, menjadi organisasi yang melintas batas-batas etnis, agama dan sosial, sehingga pada gilirannya dapat menjadi “*social and cultural capital*” yang esensial bagi pengembangan dan pemberdayaan civilitas dan demokrasi yang berkeadaban.

Di lingkungan keluarga pembinaan masyarakat multikultural dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana, misalnya kepada anak dilingkungan keluarga diperkenalkan bahwa ayahnya laki-laki, dan ibunya perempuan, kakaknya perempuan, atau adiknya laki-laki, secara sosiologis pengenalan anggota keluarga yang beragam juga sudah menggambarkan bagaimana keberagaman perspektif antara laki-laki dan perempuan diperkenalkan. Selain itu dalam bidang budaya anaknya mengetahui bahwa ayahnya orang Dayak, dan ibunya orang Jawa, secara tidak langsung pengenalan berbagai budaya

yang beragam yang dimiliki oleh kedua orangtuanya adalah hal yang patut dibanggakan karena kekayaan budaya akan dimiliki oleh semua anggota keluarga dengan bahasa, makanan, adat istiadat, dsb. Selain itu dari sisi agama diantara sesama anggota keluarga, teman, tetangga memiliki agama yang beragam sehingga untuk pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya yang dilakukan di lingkungan keluarga melalui agama sudah terlihat baik, hal ini dapat diperkuat oleh adanya budaya saling mengunjungi diantara sesama anggota keluarga, tetangga, untuk saling mengunjungi pada acara perayaan hari-hari besar keagamaan yang dirayakan oleh masing-masing agama yang beragam.

Fakta keberagaman tidak saja dapat dibenarkan secara historis, sosiologis, antropologis tetapi juga teologis. Kebenaran keberagaman secara teologis salah satunya dalam ajaran Agama Islam dapat dilihat dalam (Q.S Al-Hujurat ayat 13) menyatakan “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal”.

### **Solusi untuk Mengatasi Hambatan Pembinaan Masyarakat Multikultural di Kota Palangka Raya dalam Meningkatkan Integrasi Bangsa**

Dari paparan beberapa informan dalam deskripsi hasil penelitian serta hasil observasi penulis, solusi untuk mengatasi hambatan pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa khususnya dalam hubungan antaretnik yang dilakukan dapat terlihat pada tabel 10.

Dari pembahasan tersebut di atas mengenai solusi untuk mengatasi hambatan pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa melalui pemerintah hambatannya adalah selalu ada sikap stereotipe diantara warganya yang beragam, serta sikap ethnosentrisme yang mengagungkan budaya etniknya. Solusinya yaitu dengan adanya pemahaman mengenai nilai etika dan relativisme budaya akan memberikan pemahaman kepada warganya bahwa kita tidak hidup seperti katak dalam tempurung yang selalu menganggap milik kita yang paling baik, selain itu melalui Forum Komunikasi Lintas Etnik dan Forum Umat beragama dapat menjembatani keberagaman melalui komunikasi yang terjalin dalam forum tersebut, selain itu melalui lembaga adat dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Kedadangan di Kota Palangka Raya.

Di Kota Palangka Raya pendidikan multikultural tidak termuat secara khusus sebagai suatu mata pelajaran di sekolah, tetapi solusinya

adalah nilai-nilai multikultural dan integrasi bangsa disisipkan pada beberapa mata pelajaran seperti agama, PKn, bahasa Indonesia, cross cultural understanding di perguruan tinggi.

Berkaitan dengan hal di atas, Plato memandang multikulturalisme tidak secara eksplisit, tetapi prinsip-prinsip multikultural diperkenalkan oleh Plato dalam sebuah rancangan kurikulum pendidikan *liberal arts*, yang kualitasnya sepadan dengan kurikulum ilmu atau pendekatan ekonomi maupun politik. Sekurangnya ada dua aspek yang dimaksudkan oleh Plato dengan *liberal arts* adalah kurikulum tentang “semua” bagi “semua”. Jadi semua orang memiliki kebebasan untuk mengetahui semua hal. Diperkuat oleh pendapat Judith M. Green mengatakan bahwa keadaan multikultural akan diperoleh karena mereka mengakomodasi kelompok-kelompok kecil yang berbeda-beda kebudayaannya. Kelompok-kelompok itu selalu bersikap toleran bagi terhadap kebudayaan dominan. Tidak ada dominasi kebudayaan dalam lingkungan pendidikan

Di lingkungan keluarga pengetahuan dan pemahaman multikultural sedikit demi sedikit terbentuk melalui pendidikan yang diberikan oleh keluarga. Gambaran di tersebut di Kota Palangka Raya adanya budaya saling mengunjungi ketika hari Raya masing-masing agama memberikan pemahaman yang sangat mendalam bagi anaknya tentang masyarakat multikultural. Keluarga dalam hal ini memberikan pemahaman multikultural disesuaikan dengan tingkat perkembangan anaknya misalnya mula-mula anaknya diberitahu bahwa dia dan temannya berbeda agama, kemudian anaknya diajak untuk mengunjungi temannya yang merayakan hari raya agamanya. Hal-hal semacam itu akan membentuk pemahaman masyarakat multikultural karena secara tidak langsung sikap

**Tabel 10.** Hambatan dan Solusi dalam mengatasi hambatan pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa

	<b>Pemerintah</b>	<b>Lembaga Sosial (Paguyuban Etnik)</b>	<b>Lembaga Pendidikan (Sekolah)</b>	<b>Keluarga</b>
<b>Hambatan</b>	Stereotipe, ethnosentrisme	Fanatisme agama, ethnosentrisme	Kurikulum	Stereotipe, fanatisme etnik dan agama
<b>Solusi</b>	Nilai etika dan pluralisme budaya, FKLE, FKUB, lembaga adat kedadangan	Pertukaran demang adat, kolaborasi budaya, adaptasi budaya	PKn Agama Bahasa Indonesia Cross <i>cultural understanding</i> ,	Nilai agama, dan kemanusiaan

empati dari anak akan tumbuh apabila dia mempunyai ruang gerak yang bebas untuk dapat bergaul dengan temannya yang berbeda agama sehingga mereka dapat tahu bagaimana ia berbeda dengan yang lainnya. Kemudian dari pengetahuan dia tentang orang lain itu diharapkan akan tumbuh sikap empati dan toleransi yang tinggi terhadap keberagaman dalam masyarakat multikultural tersebut. Dengan sikap empati stereotif atau prasangka yang negatif di dalam masyarakat multikultural dapat dikurangi sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis dan rukun diantara sesama anggota keluarga yang lambat laun juga akan berpengaruh juga terhadap kehidupan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya.

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian-kajian teoritis Dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya diperlukan dalam meningkatkan integrasi bangsa karena masyarakat Kota Palangka Raya beragam secara etnik, agama, bahasa, budaya, maupun karakter individunya, sehingga harus terbentuk sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi, dan mengikatkan diri dalam kerjasama di segala bidang, untuk mencapai integrasi bangsa. Selain itu tuk menjaga keamanan, dan ketertiban, serta keharmonisan untuk hidup berdampingan karena pernah terjadi konflik etnik tahun 2001 antara etnik Madura dengan etnik Dayak yang merupakan akumulasi dari gesekan-gesekan individu yang terakumulasi menjadi konflik etnik.

*Kedua*, Bentuk pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dilakukan oleh pemerintah adalah melalui himbauan moral dari aparat pemerintah Kota Palangka Raya, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial dan budaya. Paguyuban etnik melalui bidang keagamaan, sosial, dan budaya. Sekolah melalui mata pelajaran Agama, Pkn, bahasa Indonesia, dan *cross cultural understanding* di perguruan tinggi. Serta dalam keluarga melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dalam menjalankan

hubungan sesama anggota keluarga, teman, maupun tetangga.

*Ketiga*, Solusi untuk mengatasi hambatan pembinaan masyarakat multikultural di Kota Palangka Raya dalam meningkatkan integrasi bangsa melalui pemerintah hambatannya adalah selalu ada sikap stereotif diantara warganya yang beragam, serta sikap ethnosentrisme yang mengagungkan budaya etniknya. Solusinya yaitu dengan adanya pemahaman mengenai nilai etika dan relativisme budaya akan memberikan pemahaman kepada warganya bahwa kita tidak hidup seperti katak dalam tempurung yang selalu menganggap milik kita yang paling baik, selain itu melalui Forum Komunikasi Lintas Etnik dan Forum Umat beragama dapat menjembatani keberagaman melalui komunikasi yang terjalin dalam forum tersebut, selain itu melalui lembaga adat dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Kedamaian di Kota Palangka Raya. Hambatan di paguyuban etnik adalah adanya sikap fanatisme agama, ethnosentrisme, serta sistem kekerabatan yang berbeda akan menghambat dalam proses asimilasi hubungan antaretnik. Solusinya adalah dengan adanya kolaborasi budaya sebagai bentuk asimilasi budaya, pertukaran demang adat dengan tokoh adat dari masing-masing etnik, serta melalui proses adaptasi budaya melalui moto dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, falsafah tersebut sebenarnya sudah dimiliki oleh masing-masing etnik. Hambatan dari sekolah yaitu belum adanya kurikulum yang secara khusus memberikan pendidikan multikultural. Solusinya yaitu dengan adanya mata kuliah *cross cultural understanding* dan nilai-nilai multikultural yang disisipkan pada mata pelajaran agama, Pkn, dan bahasa Indonesia. Hambatan dari keluarga adalah adanya stereotif dan fanatisme etnik serta agama akan menghambat adanya hubungan yang harmonis diantara sesama anggota keluarga, teman, dan masyarakat. Solusinya adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama masing-masing dan nilai-nilai kemanusiaan akan menghapus sikap stereotif dan fanatisme etnik maupun agama.

## DAFTAR RUJUKAN

Gunsteren, H.R.van. 1998. *A Theory of Citizenship: Organizing Plurality in*

*Contemporary Democracy*. Colorado: Westview Press.

- Kymlicka Will. 2003. *Kewarganegaraan Multikultural*. Jakarta:PT Pustaka LP3ES.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka Dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta:LKIS
- Marzali, Amri. 2003. *Perbedaan etnis dalam Konflik : Sebuah analisis Sosial-Ekonomi terhadap Kekerasan Di Kalimantan. Dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan PBB.
- Muhaimin, Yahya, dkk 1985. *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press
- Muqtaf, Khoiruf. 2003. *Paradigma Multikultural*. Jakarta:Piramida Circle
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Komunikasi antar budaya, panduan berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya*. Bandung:PT Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2005. *Komunikasi Efektif suatu pendekatan lintas budaya*. Bandung:PT Rosdakarya
- Nieto. Sonia. 1991. *Affirming Diversity The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York & London : Longman
- Parekh, Bikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism. Keberagaman Budaya dan teori Politik*. Yogyakarta:Kanisius
- Renan, Ernest. 1994. *Apakah Bangsa Itu? (Qu'est ce qu'une nation?)*. Alih Bahasa Prof. Mr. Sunario. Bandung: Penerbit Alumni.
- Simatupang, Maruits. 2002. *Budaya Indonesia yang Supraetnis*. Jakarta:Papas Sinar Sinanti.
- Supardan, Dadang. 2004. *Pembelajaran Sejarah Berbasis Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global, Untuk Integrasi Bangsa ; Studi Kasus Eksperimental Terhadap Siswa Sekolah Menengah Umum di Kota Bandung*. Disertasi Doktor pada Program pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung : tidak diterbitkan
- Suparlan, Parsudi. 2003. *Etnisitas dan potensinya Terhadap Disintegrasi sosial di Indonesia. Dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan PBB
- Yakin, ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta:Pilar Media.
- Yin. R.K. 2008. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.